

ISU HIJAB DI PRANCIS 1989-2004: ANTARA PERINTAH TUHAN DAN PRINSIP LAÏCITÉ

Afifah Ilma Zein^a, Faizal Arifin^b, Jajang Jahroni^c, Nurul Azizah^d, Zakiya Darojat^e

afifahilmazein@gmail.com, faizal.arifin@uinjkt.ac.id, jajang.jahroni@uinjkt.ac.id, nurul@uinjkt.ac.id, zakiya.darojat@uinjkt.ac.id

^{a b c d e} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 5th July 2026

Revised: 4th August 2026

Accepted: 12th August 2026

Published: 13th August 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v7i1.410>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan isu hijab di sekolah negeri Prancis pada periode 1989-2004, mulai dari insiden College Gabriel-Havez di Creil hingga pengesahan *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004*. Berbeda dari sebagian besar kajian yang berfokus pada kebijakan negara, perdebatan intelektual, atau aspek hukum, penelitian ini menelusuri perkembangan polemik hijab melalui pengalaman para siswi Muslim, dinamika kebijakan sekolah, dan perubahan kebijakan negara selama periode tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian mencakup arsip audiovisual Institut National de l'Audiovisuel (INA), laporan media sezaman, terutama *Le Monde*, dokumen hukum, serta karya-karya akademik yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan empat temuan utama. Pertama, para siswi memaknai hijab sebagai bagian dari identitas keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, sedangkan pihak sekolah menempatkannya dalam kerangka penerapan prinsip *laïcité*. Kedua, penyelesaian polemik pada periode 1989-1992 berlangsung melalui dialog, negosiasi, dan penafsiran yang berbeda di setiap sekolah, sehingga pengalaman para siswi tidak bersifat seragam. Ketiga, sejak terbitnya *Circulaire Bayrou* pada 1994 hingga pembentukan Komisi Stasi pada 2003, perdebatan bergeser dari persoalan yang berkembang di lingkungan sekolah menuju perdebatan politik nasional mengenai *laïcité*, integrasi, dan identitas republik. Keempat, pengesahan *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004* menggantikan penyelesaian kasus per kasus di tingkat sekolah dengan kerangka hukum nasional yang berdampak pada pendidikan dan cara sebagian siswi Muslim mempertahankan identitas keagamaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan isu hijab di Prancis tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan negara, tetapi juga dengan pengalaman para siswi Muslim yang menjadi bagian penting dari sejarah polemik tersebut.

KATA KUNCI

Hijab, *laïcité*, siswi muslim, Prancis, sejarah sosial.

ABSTRACT

This study examines the development of the hijab issue in French public schools between 1989 and 2004, beginning with the *Affaire du Foulard* at Collège Gabriel-Havez in Creil and culminating in the enactment of *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004*. Unlike previous studies that primarily focus on state policy, legal aspects, or intellectual debates, this research traces the evolution of the hijab controversy through the experiences of Muslim schoolgirls, school-level policy dynamics, and changes in state policy during the period. The study employs a social history approach using the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources include audiovisual archives from the Institut National de l'Audiovisuel (INA), contemporary media reports—particularly *Le Monde*—legal documents, and relevant scholarly works. The findings reveal four main points. First, Muslim schoolgirls understood the hijab as an integral part of their religious identity, whereas school authorities interpreted it within the framework of *laïcité*. Second, between 1989 and 1992, the controversy was addressed through dialogue, negotiation, and differing interpretations at the school level, resulting in diverse experiences among Muslim schoolgirls. Third, following the issuance of the *Circulaire Bayrou* in 1994 and the establishment of the Stasi Commission in 2003, the debate gradually shifted from school-based disputes to a broader national discussion concerning *laïcité*, integration, and republican identity. Fourth, the enactment of *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004* replaced case-by-case resolutions at the school level with a uniform national legal framework, affecting both educational opportunities and the ways in which Muslim schoolgirls maintained their religious identity. This study argues that the development of the hijab issue in France cannot be understood solely through changes in state policy but must also be examined through the experiences of Muslim schoolgirls, whose voices constitute an essential part of the history of the French hijab controversy.

KEYWORDS

Headscarf, *laïcité*, Muslim schoolgirls, France, social history

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pelarangan hijab di sekolah negeri Prancis tidak dapat dipahami tanpa terlebih dahulu menelusuri akar historisnya yang lebih dalam. Prancis memulai ekspansi kolonialnya di Afrika Utara pada 1830 ketika merebut Aljazair, diikuti dengan penetapan protektorat atas Tunisia (1881), dan Maroko (1912). Selama lebih dari satu abad, kawasan Maghreb berada di bawah kendali administratif dan budaya Prancis yang meninggalkan jejak yang dalam berupa ikatan struktural yang kemudian mendorong gelombang migrasi besar-besaran ke Prancis pasca-Perang Dunia II dan pasca-kemerdekaan Aljazair (1962).¹

Gelombang migrasi ini mendorong terbentuknya komunitas Muslim yang besar di Prancis. Pada akhir 1980-an, komunitas Muslim tidak lagi didominasi oleh pekerja migran generasi pertama, melainkan telah berkembang menjadi generasi kedua yang lahir, tumbuh, dan mengenyam pendidikan di Prancis hingga menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Katolik. Kehadiran generasi kedua yang mempertahankan identitas Muslim yang mulai memasuki institusi pendidikan negeri ini memunculkan tantangan dan pertanyaan yang belum pernah dihadapi Prancis sebelumnya yaitu bagaimana negara yang berlandaskan prinsip universalisme republikan mengakomodasi ekspresi identitas keagamaan di ruang pendidikan.²

Pertanyaan ini tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan berbenturan langsung dengan prinsip *laïcité* atau sekularisme khas Prancis yang berakar pada Undang-undang 9 Desember 1905 tentang pemisahan Gereja dan Negara. *Laïcité* menempatkan negara dan institusi publik dalam posisi netral terhadap agama. Dalam bidang pendidikan, sekolah negeri dipandang sebagai ruang pembentukan warga negara republik sehingga ekspresi identitas keagamaan menjadi persoalan yang sangat sensitif.³

Sebelum menelusuri kronologi persoalan tersebut, perlu ditegaskan lebih dahulu istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Hijab atau *foulard* merujuk pada kerudung yang menutupi rambut, leher, sementara wajah tetap terlihat, sebagaimana yang dikenakan oleh Fatima, Leïla, dan Samira di Creil. Istilah ini perlu dibedakan dari niqab, yaitu penutup yang hanya menyisakan bagian mata, dan burqa, yaitu busana yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dengan kain

¹ "The Colonial and Post-Colonial Dimensions of Algerian Migration to France, an Article from History in Focus," accessed June 20, 2026, <https://archives.history.ac.uk/history-in-focus/Migration/articles/house.html>; Paul Silverstein, "Headscarves and the French Tricolor," Middle East Research and Information Project, January 30, 2004, <https://www.merip.org/2004/01/headscarves-and-the-french-tricolor/>.

² Michel Wieviorka, *Kepel (Gilles) - Les banlieues de l'Islam, Naissance d'une religion en France.*, 1989, https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1989_num_39_4_394435_t1_0593_0000_001; Barsihannor Annur, "Perkembangan Pemikiran Islam Di Prancis," *Jurnal Adabiyah* 14, no. 1 (June 2014): 25-31.

³ Loi Du 9 Décembre 1905 Concernant La Séparation Des Eglises et de l'Etat. - Légifrance, accessed June 21, 2026, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749>; Othon Guerlac, "The Separation of Church and State in France," *Political Science Quarterly* 23, no. 2 (June 1908): 259-96, <https://doi.org/10.2307/2141325>.

berlapis di bagian mata. Ketiga istilah tersebut kerap dipertukarkan secara keliru dalam media maupun wacana publik, padahal merujuk pada jenis busana yang berbeda. Kasus-kasus yang dibahas dalam penelitian ini, sejak Creil pada 1989 hingga pengesahan Undang-undang 2004, secara khusus berkaitan dengan pemakaian hijab (*foulard*) di lingkungan sekolah, bukan niqab atau burqa. Masuknya generasi kedua Muslim yang lahir dan besar di Prancis ke dalam institusi pendidikan negeri membuat batas antara kebebasan menjalankan ajaran agama dan tuntutan netralitas sekolah tidak lagi bersifat teoretis, melainkan berubah menjadi persoalan konkret yang harus dihadapi sehari-hari di ruang kelas.⁴

Ketegangan antara identitas keagamaan dan prinsip *laïcité* mencuat secara nasional melalui *Affaire du Foulard* (Kasus Hijab) di Creil pada 3 Oktober 1989. Tiga siswi Muslim, Fatima Achaboun, Leïla Achaboun, dan Samira Saidani, tetap mengenakan hijab saat mereka mengikuti kegiatan belajar di College Gabriel-Havez di Creil. Kepala sekolah Ernest Chénier meminta mereka untuk melepasnya tetapi ketiganya menolak. Sekolah ini berada di *Zone d'Education Prioritaire* (ZEP), sebuah kawasan pendidikan prioritas dengan latar belakang siswa yang beragam secara sosial dan etnis.⁵ Keputusan kepala sekolah untuk mengeluarkan dan melarang tiga siswi pengguna hijab memicu perdebatan luas yang melibatkan pemerintah, media, intelektual, organisasi muslim, dan masyarakat Prancis secara umum.⁶ Sejak saat itu, persoalan hijab di sekolah negeri berkembang menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hubungan antara Islam dan negara Prancis, yang akhirnya bermuara pada lahirnya Undang-undang nomor 2004-228 tentang larangan penggunaan simbol keagamaan yang mencolok di sekolah negeri.⁷

Polemik di Creil tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai hijab, tetapi juga berlangsung bersamaan dengan pembahasan yang lebih luas mengenai integrasi anak-anak keturunan imigran dalam sistem pendidikan negeri Prancis. Pada awal 1990, Menteri Pendidikan Nasional Lionel Jospin menegaskan bahwa integrasi anak-anak imigran mensyaratkan pengurangan kesenjangan bagi seluruh peserta didik, bukan hanya melalui struktur pendidikan khusus bagi anak imigran yang telah berjalan sejak akhir 1970-an. Konteks ini memperlihatkan bahwa polemik hijab di Creil tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan ketegangan sosial, etnis,

⁴ Adrien K. Wing and Monica Nigh Smith, "Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscarf Ban," SSRN Scholarly Paper no. 1130247 (Rochester, NY: Social Science Research Network, May 30, 2008), <https://papers.ssrn.com/abstract=1130247>; Mutiara Marsha Anjani et al., "Problematisasi Larangan Berhijab Di Prancis," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022), <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/486>.

⁵ "Trois Foulards Contre La « Sérénité Laïque », " *Le Monde*, Trois Foulards Contre La, October 7, 1989, https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/10/07/trois-foulards-contre-la-serenite-laique_4130105_1819218.html.

⁶ Trois Foulards Contre La, "Trois Foulards Contre La « Sérénité Laïque »."

⁷ LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics (1) - Légifrance, accessed May 12, 2026, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977>.

dan keagamaan yang lebih luas seputar posisi sekolah negeri sebagai institusi integrasi.⁸

Di tengah luasnya perdebatan tersebut, pengalaman para siswi justru relatif jarang memperoleh perhatian, yaitu bagaimana para siswi Muslim itu sendiri mengalami dan memaknai pelarangan tersebut. Perdebatan publik lebih banyak diwarnai oleh pandangan politisi, akademisi, jurnalis, dan aktivis, sementara pengalaman para siswi yang terdampak langsung relatif jarang muncul dalam ruang publik.⁹ Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelusuri perkembangan isu hijab di Prancis pada periode 1989-2004 melalui rekonstruksi pengalaman para siswi Muslim, dinamika kebijakan di lingkungan sekolah, serta perubahan kebijakan negara hingga pengesahan Undang-undang Nomor 2004-228 tentang larangan penggunaan simbol keagamaan mencolok di sekolah negeri. Dengan demikian, pengalaman para siswi tidak diposisikan sebagai satu-satunya fokus kajian, melainkan sebagai salah satu unsur penting untuk memahami perkembangan polemik hijab di Prancis secara lebih utuh.

Penelitian terdahulu mengenai polemik hijab di Prancis telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Sebagian besar kajian menempatkan kebijakan negara, prinsip *laïcité*, serta perdebatan mengenai identitas nasional sebagai pusat analisis. Amani Hamdan dalam *The Issue of Hijab in France: Reflections and Analysis* membahas hijab dalam kaitannya dengan identitas Muslim, pendidikan, feminisme, dan hubungan antara Islam dengan negara Sekuler. Sementara itu, Justin Vaisse dalam *Veiled Meaning: The French Law Banning Religious Symbols in Public Schools* menjelaskan latar belakang lahirnya Undang-undang 2004 serta peran Komisi Stasi dalam perumusan kebijakan pelarangan simbol keagamaan di sekolah negeri. Kajian Joan Wallach Scott dalam *The Politics of the Veil* memperluas pembahasan tersebut dengan menempatkan kontroversi hijab dalam identitas nasional, sekularisme, dan integrasi komunitas Muslim di Prancis.¹⁰

Penelitian lain lebih banyak menyoroti dampak kebijakan *laïcité* terhadap komunitas Muslim secara umum. Artikel *Pengaruh Kebijakan Laïcité terhadap Muslim di Institusi Pendidikan pada Masa Pemerintahan Macron*, Kajian Sekularisme

⁸ "Mettant en cause les enseignements spécifiques pour les immigrés M. Jospin insiste sur la réduction des inégalités pour tous les enfants," Archives, *Le Monde*, February 1, 1990, https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/02/01/mettant-en-cause-les-enseignements-specifiques-pour-les-immigres-m-jospin-insiste-sur-la-reduction-des-inegalites-pour-tous-les-enfants_3968492_1819218.html.

⁹ Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar, *Le Foulard et la République* (Paris: Éditions La Découverte, 1995).

¹⁰ Amani Hamdan, "The Issue of Hijab in France: Reflections and Analysis," *Muslim World Journal of Human Rights* 4, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1079>; "Veiled Meaning: The French Law Banning Religious Symbols in Public Schools," *Brookings*, n.d., accessed May 12, 2026, <https://www.brookings.edu/articles/veiled-meaning-the-french-law-banning-religious-symbols-in-public-schools/>; Joan Wallach Scott, "Chapter 1. The Headscarf Controversies," in *The Politics of the Veil* (Princeton University Press, 2019), 21-41, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781400827893-004/html?lang=en>.

dan Islamofobia dalam Kebijakan Publik Prancis terhadap Muslim serta penelitian Muhammad Ridha Basri dalam *Dilema Negara Sekuler Prancis: Di antara Tarikan Islamofobia, dan Fundamentalisme Agama* membahas hubungan antara penerapan *laïcité*, diskriminasi, Islamofobia, dan posisi Muslim dalam masyarakat Prancis kontemporer. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas negara, kebijakan, dan komunitas Muslim sebagai kelompok sosial yang luas.¹¹

Di antara berbagai penelitian tersebut, karya Francoise Gaspard dan Farhad Khosrokhavar dalam *Le Foulard et la République* (1995) menjadi salah satu kajian yang membahas pengalaman dan pandangan siswi Muslim melalui wawancara mendalam.¹² Kajian ini memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas pemakaian hijab oleh perempuan Muslim di Prancis. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pemakaian hijab dan pengalaman para informan pada masa penelitian dilakukan. Sementara itu, penelitian ini menelusuri perkembangan isu hijab secara historis dengan memanfaatkan arsip audiovisual, laporan media sezaman, dan dokumen hukum, mulai dari kasus Creil di Collège Gabriel-Havez pada 1989 hingga pengesahan Undang-undang Nomor 2004-228 pada 2004. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas pengalaman para siswi, tetapi juga menempatkannya dalam konteks perubahan sosial, pendidikan, dan kebijakan negara selama periode tersebut.

Kajian mengenai isu hijab di Prancis pada periode 1989-2004 juga memiliki relevansi bagi pembaca Indonesia. Meskipun latar belakang sejarah dan sistem kenegaraan kedua negara berbeda, keduanya pernah mengalami perdebatan mengenai penggunaan jilbab di lingkungan sekolah negeri. Di Indonesia, persoalan tersebut mengemuka pada masa Orde Baru melalui kebijakan seragam sekolah yang membatasi penggunaan jilbab sebelum mengalami perubahan pada awal 1990-an.¹³ Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hubungan antara identitas keagamaan, institusi pendidikan, dan kebijakan negara tidak hanya terjadi di Prancis, tetapi juga pernah menjadi bagian dari dinamika sejarah Indonesia. Oleh karena itu, penelusuran terhadap perkembangan isu hijab di Prancis dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana persoalan serupa berkembang dalam latar sejarah dan kebijakan yang berbeda.

¹¹ Syifa Esmano and Airin Miranda, "Pengaruh Kebijakan Laïcité Terhadap Muslim Di Institusi Pendidikan Negeri Prancis Pada Masa Pemerintahan Macron," *Multikultura* 1, no. 1 (January 2022), <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1082>; Muhammad Alfareza Romadhoni, "Sekularisme Dan Islamophobia Dalam Kebijakan Publik Prancis Terhadap Muslim: Studi Transformasi Laïcité Dan Diskriminasi Terlembaga Pasca 2020," *Jurnal Globalisasi Dan Luar Negeri* Vol. 1 No. 2 (July 2024), <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/12946>; Muhammad Ridha Basri, "Dilema Negara Sekuler Prancis: Di antara Tarikan Islamofobia dan Fundamentalisme Agama," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (July 2022): 143-59, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i1.3127>.

¹² Francoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar, *Le Foulard et la République*.

¹³ Leni Nuraeni and Setia Gumilar, "Pelarangan Dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Pelajar Putri Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (December 2021): 163-75, <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i2.15119>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk mengkaji perkembangan isu hijab di Prancis pada periode 1989-2004 dengan menempatkan pengalaman siswi Muslim sebagai salah satu fokus analisis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran pengalaman kelompok yang sering kali kurang memperoleh perhatian dalam kajian yang lebih banyak berfokus pada kebijakan negara, aspek hukum, maupun perdebatan publik.¹⁴

Penelitian dilakukan melalui tahapan metode sejarah, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya merekonstruksi perkembangan isu hijab di Prancis selama periode 1989-2004 melalui pengalaman para siswi muslim sebagai salah satu fokus analisis berdasarkan sumber-sumber yang dapat diverifikasi.¹⁵

Pada tahap heuristik, penelitian ini mengumpulkan dua kategori sumber. Pertama, sumber primer sezaman: (a) arsip audiovisual Institut National de l'Audiovisuel (INA) dan laporan media sezaman yang mendokumentasikan kesaksian Fatima Achaboun, Saïda;¹⁶ (b) laporan Conseil d'Etat No. 346.893 tanggal 27 November 1989;¹⁷ (c) surat edaran Bayrou September 1994;¹⁸ (d) laporan komisi stasi Desember 2003;¹⁹ dan (e) Loi n 2004-228 du 15 mars 2004.²⁰ Kedua, sumber sekunder berupa karya-karya akademik yang relevan dengan polemik hijab di Prancis, baik yang membahas perkembangan kebijakan maupun pengalaman perempuan Muslim.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

¹⁵ M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, pertama (Depok: Prenadamedia Group, 2014); M. Dien Madjid, *Metode Sejarah: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021).

¹⁶ *Les écolières voilées de Creil* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/video/cab89042462/les-ecolieres-voilees-de-creil>; Trois Foulards Contre La, "Trois Foulards Contre La « Sérénité Laïque »"; Rone Tempest, "Muslim Schoolgirl Scarves Banned; France in a Furor," Los Angeles Times, November 7, 1989, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-07-mn-880-story.html>.

¹⁷ *Décision conseil d'état* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/video/cab89050148/decision-conseil-d-etat>; "Avis N° 346.893 Du Conseil d'Etat - 27/11/1989 - Port Du Foulard Islamique - A PHP DAJDP," accessed June 21, 2026, <https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/avis-n-346-893-du-conseil-detat-27111989-port-du-foulard-islamique/>.

¹⁸ "Prononcé le 10 septembre 1994 - François Bayrou 10091994 Le Point foulard islamique école | Vie publique," September 10, 1994, <https://www.vie-publique.fr/discours/216918-francois-bayrou-10091994-le-point-foulard-islamique-ecole>; Encyclopædia Universalis, "France. Circulaire du ministère de l'Éducation sur le port des signes religieux à l'école. 20 septembre 1994 - Événement," Encyclopædia Universalis, accessed June 30, 2026, <https://www.universalis.fr/evenement/20-septembre-1994-circulaire-du-ministere-de-l-education-sur-le-port-des-signes-religieux-a-l-ecole/>.

¹⁹ "Prononcé le 3 juillet 2003 - Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la laïc | Vie publique," July 3, 2003, <https://www.vie-publique.fr/discours/140444-allocution-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-laic>; "Commission de réflexion sur application du principe de laïcité | Vie publique," December 2003, <https://www.vie-publique.fr/rapport/26626-commission-de-reflexion-sur-application-du-principe-de-laicite>.

²⁰ LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics (1) - Légifrance.

Pada tahap kritik sumber, validitas kesaksian diuji melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa asal-usul arsip INA, meliputi lembaga produksi, tanggal penayangan, serta konteks program tempat rekaman disiarkan. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan laporan media sezaman, terutama *Le Monde*, serta dokumen resmi yang berasal dari periode yang sama. Sebagai contoh, kesaksian Fatima Achaboun dalam arsip INA dibandingkan dengan pemberitaan *Le Monde* edisi Oktober 1989 untuk memeriksa kesesuaian mengenai identitas, usia, status sekolah, dan kronologi peristiwa di Collège Gabriel-Havez.

Kritik internal dilakukan dengan menelaah isi kesaksian, konteks pertanyaan yang diajukan pewawancara, serta mempertimbangkan kemungkinan pengaruh situasi wawancara, kehadiran kamera, maupun lingkungan sekitar terhadap jawaban narasumber. Pernyataan Fatima juga dibandingkan dengan rekaman INA lainnya dan dengan berbagai laporan *Le Monde* yang memuat kutipan berbeda pada periode yang sama. Melalui prosedur tersebut, kesaksian Fatima diperlakukan sebagai salah satu sumber primer yang kesahihannya diuji melalui perbandingan dengan arsip audiovisual, laporan media sezaman, dan dokumen resmi, sehingga tidak digunakan sebagai representasi tunggal pengalaman seluruh siswi Muslim di Prancis.

Pada tahap interpretasi, fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses kritik sumber dianalisis menggunakan Teori Identitas Sosial yang dikemukakan Henri Tajfel dan John Turner. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pemaknaan hijab sebagai bagian dari identitas sosial sebagian siswi Muslim serta respons yang muncul ketika identitas tersebut berhadapan dengan kebijakan sekolah dan prinsip *laïcité*. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian secara kronologis untuk menjelaskan perkembangan isu hijab di Prancis sejak *Affaire du Foulard* di Creil pada 1989 hingga pengesahan *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004*.²¹

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh komunitas Muslim di Prancis. Analisis difokuskan pada pola-pola yang muncul secara konsisten dalam berbagai sumber primer dan sekunder, baik mengenai pengalaman siswi, penerapan kebijakan sekolah, maupun perkembangan regulasi negara selama periode 1989-2004.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hijab sebagai Identitas Keagamaan Siswi Muslim

Perdebatan mengenai penggunaan hijab di sekolah negeri Prancis bermula pada awal tahun ajaran 1989 di Collège Gabriel-Havez, Creil (Oise), dan berkembang menjadi polemik nasional setelah tiga siswi muslim menolak melepas hijab saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Oktober tahun yang sama. Ketiga siswi tersebut adalah Fatima Achaboun (14 tahun), Leïla Achaboun (13 tahun), dan Samira

²¹ Henri Tajfel and John C. Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict," in *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey, California, 1979), 33-47.

Saidani (15 tahun). Mereka tetap mempertahankan hijab di ruang kelas meskipun kepala sekolah Ernest Chénière meminta hijab tersebut dilepaskan.²² Sikap tersebut ditafsirkan oleh pihak sekolah sebagai pelanggaran terhadap prinsip *laïcité* yaitu asas sekularisme yang menjadi salah satu fondasi sistem pendidikan negeri Prancis. Bagi ketiga siswi tersebut, hijab bukan sekadar aksesori pakaian, melainkan bagian tidak terpisahkan dari identitas keagamaan yang berakar pada keyakinan pribadi dan kehidupan sehari-hari mereka. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan ketegangan antara pemahaman institusi sekolah terhadap prinsip *laïcité* dan pemaknaan individual terhadap praktik keberagaman. Berdasarkan pemberitaan Le Monde, ketiga siswi yang terlibat dalam kasus Creil adalah Fatima Achaboun dan Leila Achaboun, dua bersaudara berkewarganegaraan Maroko, serta Samira Saidani, siswi berkewarganegaraan Tunisia. Ketiganya bersekolah di Collège Gabriel-Havez, sebuah sekolah menengah pertama yang berada di kawasan Zone d'Education Prioritaire di Creil, Oise.

Gambar 1. College Gabriel-Havez di Creil, Prancis, lokasi terjadinya Affaire du Foulard yang melibatkan Fatima, Leila, dan Samira pada Oktober 1989.



(Sumber: France 3 Hauts-de-France, "C'était en octobre 1989, à Creil")

Kasus Creil menjadi titik awal Affaire du Foulard, istilah yang kemudian digunakan secara luas dalam pemberitaan media Prancis untuk merujuk pada polemik penggunaan hijab di sekolah negeri.

Pemaknaan mengenai hijab berbeda dengan narasi yang berkembang dalam perdebatan publik Prancis pada akhir 1980-an yang cenderung memosisikan hijab sebagai simbol politik atau ancaman terhadap prinsip *laïcité*. Arsip audiovisual Institut National de l'Audiovisuel (INA) merekam penjelasan Fatima Achaboun

²² "Trois Foulards Contre La « Sérénité Laïque », " Le Monde, Trois Foulards Contre La, October 7, 1989, https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/10/07/trois-foulards-contre-la-serenite-laique_4130105_1819218.html.

mengenai alasan mempertahankan hijabnya. Dalam wawancara tersebut ia mengatakan:²³

“Je crains Dieu, je ne crains personne sauf Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort.”

(“Saya hanya takut kepada Tuhan. Saya tidak takut kepada siapa pun selain Tuhan. Saya akan terus mengenakan hijab saya sampai akhir hidup”)

Pernyataan Fatima menempatkan ketaatan kepada Tuhan di atas tuntutan administratif sekolah. Dalam pemahamannya, penggunaan hijab merupakan bagian dari kewajiban agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagi Fatima, hijab merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, tekanan dari pihak sekolah tidak mengubah keputusannya untuk tetap mengenakan hijab. Fatima dan Leila telah mempelajari Al-Qur'an sejak usia tiga tahun, menjalankan salat lima waktu setiap hari, serta tetap memiliki cita-cita untuk berhasil dalam pendidikan. Informasi tersebut menempatkan praktik keberagamaan Fatima dan Leila telah jauh terbentuk sebelum polemik Creil berkembang menjadi isu nasional.²⁴

Perspektif lain dalam wawancara yang sama dengan ayah Fatima dan Leila, Ali Achaboun yang membantah anggapan ia memaksa kedua putrinya mengenakan hijab. Ketika ditanya oleh jurnalis apakah ia mewajibkan putri-putrinya berhijab, ia menjawab, *“Absolument pas”* (“Sama sekali tidak”). Ia bahkan menegaskan bahwa apabila anak-anaknya memilih untuk tidak mengenakan hijab, keputusan tersebut merupakan pilihan mereka sendiri.²⁵ Kesaksian ini berbeda dari anggapan yang berkembang dalam sebagian perdebatan publik yang sering menghubungkan penggunaan hijab dengan tekanan keluarga atau komunitas. Pengalaman Fatima dan Leila memperlihatkan situasi yang lebih rumit dibandingkan gambaran yang beredar dalam berbagai perdebatan.

Pemaknaan hijab sebagai bagian dari keyakinan agama tidak hanya muncul dalam pengalaman Fatima dan Leila di Creil. Tidak lama setelah polemik tersebut mencuat, peristiwa serupa terjadi di Lycée Philippe-de-Girard, Avignon. Saïda, seorang siswi Muslim yang telah mengenakan hijab selama sekitar tiga tahun, diminta kepala sekolah untuk melepas hijab atau tidak kembali mengikuti pelajaran. Dalam wawancara yang disiarkan Antenne 2, ia menyatakan,

“Chacun croit en quelque chose... Je ne vois pas pourquoi le proviseur va m'enlever ce que j'ai.”

(“Setiap orang memiliki sesuatu yang diyakininya... saya tidak mengerti kenapa kepala sekolah harus mengambil apa yang saya miliki.”).

²³ *Refusal of Admission to the College of Creil*, n.d., accessed June 30, 2026, <https://mediaclip.ina.fr/en/cab89042091-refusal-of-admission-to-the-college-of-creil.html>.

²⁴ *Refusal of Admission to the College of Creil*, 1989, <https://mediaclip.ina.fr/en/cab89042091-refusal-of-admission-to-the-college-of-creil.html>.

²⁵ *Refusal of Admission to the College of Creil*.

Ketika ditanya mengenai pilihannya, Saïda menambahkan, “*L'école aussi, c'est important, mais ça ne vaut pas la religion.*” Yang dapat diterjemahkan sebagai, (“Sekolah juga penting, tetapi tidak sebanding dengan agama.”).²⁶ Bagi Saïda, hijab merupakan bagian dari keyakinan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya, bahkan ketika pilihan tersebut berisiko menghambat kelanjutan pendidikannya. Pemberitaan tersebut juga merekam dukungan teman-teman sekelasnya. Sebagai bentuk solidaritas, beberapa siswi datang ke sekolah dengan mengenakan hijab, sementara sebagian siswa lain menyatakan kesiapan melakukan demonstrasi maupun mogok belajar apabila Saïda tidak diizinkan kembali ke sekolah. Pengalaman di Avignon memperluas temuan dari kasus Creil. Perdebatan mengenai hijab pada 1989 tidak lagi terbatas pada satu sekolah, tetapi telah muncul di berbagai institusi pendidikan dengan pengalaman dan respons yang berbeda-beda.

Kompleksitas makna hijab juga muncul dalam penelitian Francoise Gaspard dan Farhad Khosrokhavar yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap puluhan siswi Muslim di wilayah Paris dan Dreux pada periode 1993-1994. Penelitian tersebut memperlihatkan berbagai pemaknaan hijab di kalangan siswi Muslim. Sebagian memaknainya sebagai kewajiban agama yang tidak dapat ditawar, sebagian lain memahaminya sebagai penanda identitas budaya dan keluarga, sementara yang lain menganggapnya sebagai cara menjaga martabat dan kehormatan diri di ruang publik.²⁷ Keragaman pengalaman tersebut berbeda dari gambaran yang sering muncul dalam wacana politik maupun pemberitaan media yang cenderung menempatkan siswi Muslim sebagai kelompok yang seragam.

Berbagai pemberitaan sezaman menunjukkan, sejak akhir 1989 hijab tidak lagi diperdebatkan semata sebagai persoalan disiplin sekolah, tetapi telah berkembang menjadi simbol identitas keagamaan, integrasi, dan masa depan prinsip *laïcité* di Prancis. Dalam perspektif Teori Identitas Sosial yang dikemukakan Tajfel dan Turner (1979), pengalaman Fatima, Leïla, Samira, dan Saïda memperlihatkan satu pola yang sama. Hijab dimaknai sebagai bagian dari identitas keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Sebaliknya, pihak sekolah memaknainya sebagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *laïcité* di ruang pendidikan negeri. Perbedaan pemaknaan tersebut menjadi titik awal bergesernya polemik dari pengalaman individual para siswi menuju perdebatan politik dan hukum di tingkat nasional.

Pengalaman Siswi dalam Menghadapi Kebijakan Sekolah

Larangan mengenakan hijab di ruang kelas tidak serta-merta mengakhiri perjuangan Fatima, Leïla, dan Samira dalam memperoleh hak atas pendidikan. Setelah keputusan kepala sekolah Ernest Chénrière membatasi penggunaan hijab

²⁶ *Voiles, lycée Avignon* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/video/cab89044629/voiles-lycee-avignon>.

²⁷ Francoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar, *Le Foulard et la République* (Paris: Éditions La Découverte, 1995).

pada September 1989, ketiga siswi tersebut justru memasuki rangkaian negosiasi yang melibatkan keluarga, pihak sekolah, tokoh agama, hingga pemerintah pusat. Arsip audiovisual INA memperlihatkan konflik yang bermula di Creil tidak berkembang menjadi penolakan total terhadap sistem persekolahan, melainkan menjadi arena pencarian titik temu antara prinsip *laïcité* dan hak kebebasan beragama.²⁸

Kepala sekolah memutuskan untuk memulangkan Fatima, Leïla, dan Samira dari kegiatan belajar mengajar, namun tidak mengeluarkan mereka secara permanen dari Collège Gabriel-Havez. Kebijakan tersebut menempatkan ketiga siswi pada dilema yang berat yaitu mereka harus memilih antara mempertahankan keyakinan agama atau melanjutkan pendidikan formal. Meskipun demikian, berbagai kesaksian memperlihatkan satu kesamaan. Pendidikan tidak pernah mereka pandang pendidikan sebagai sesuatu yang harus dikorbankan.²⁹

Dalam rekaman INA, Fatima menyatakan dengan tegas, “*Moi, je veux continuer mes études, je veux travailler*” yang artinya (“Saya ingin melanjutkan pendidikan saya, saya ingin bekerja”).³⁰ Keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan tetap menjadi bagian penting dari cita-cita Fatima meskipun ia mempertahankan hijabnya. Perdebatan di Creil tidak lahir dari penolakan terhadap pendidikan, melainkan upaya mempertahankan identitas keagamaan tanpa kehilangan hak atas pendidikan di sekolah negeri.

Ketegangan yang berkembang sejak September 1989 kemudian mendorong dilakukannya berbagai perundingan antara keluarga Achaboun dan pihak sekolah. Pada awal Oktober 1989 tercapai sebuah kesepakatan sementara yang mengizinkan Fatima dan Leila memasuki lingkungan sekolah dengan tetap mengenakan hijab, tetapi mewajibkan keduanya menurunkan hijab ke bahu selama proses pembelajaran berlangsung.³¹

²⁸ *Les écolières voilées de Creil* | INA; *Décision conseil d'état* | INA, n.d., accessed June 30, 2026, <https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/video/cab89050148/decision-conseil-d-etat>.

²⁹ *Refusal of Admission to the College of Creil*; Tempest, “Muslim Schoolgirl Scarves Banned; France in a Furor.”

³⁰ *Refusal of Admission to the College of Creil*.

³¹ *Foulards islamiques* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/video/cab89051112/foulards-islamiques>.

Gambar 2. Fatima dan Leila Achaboun bersama ayah mereka, Ali Achaboun, pada 9 Oktober 1989 setelah tercapainya kesepakatan dengan College Gabriel-Havez.



(Sumber: Leimdorfer/AFP, dimuat dalam CNEWS, 2019)

Bagi pihak sekolah, kompromi tersebut dipandang sebagai jalan keluar untuk meredakan konflik yang terus berkembang. Dalam wawancara yang direkam INA, Ernest Cheniere menjelaskan perlunya *Calmer le jeu* (menenangkan situasi) agar hubungan antara sekolah, keluarga, dan para siswi dapat kembali secara normal.³²

Dalam laporan salah seorang guru College Gabriel-Havez yang dimuat dalam majalah *Hommes & Migrations* (1990) menunjukkan penyelesaian kasus Creil pada tahap awal masih ditempuh melalui negosiasi dan kompromi. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari titik temu antara tuntutan sekolah dan keinginan para siswi untuk tetap menjalankan keyakinannya. Meskipun sempat meredakan ketegangan, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mengakhiri perdebatan yang berkembang menjadi perhatian publik nasional. Persoalan yang semula berlangsung di lingkungan sekolah perlahan melibatkan media, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aktor politik di tingkat nasional.³³

Arsip INA juga merekam sikap Fatima terhadap berbagai aksi dukungan yang muncul selama polemik berlangsung. Dalam salah satu wawancara ia menyatakan tidak mengikuti demonstrasi yang diselenggarakan di Paris untuk mendukung para siswi berjilbab. Fatima mengatakan:³⁴

“Moi, je ne fais pas la manifestation. Meme la manifestation qu’il y a eu a Paris, je n’y ai pas ete”

(“Saya tidak ikut demonstrasi. Bahkan demonstrasi yang diselenggarakan di Paris pun saya tidak datang.”)

³² *Les écolières voilées de Creil* | INA.

³³ *Hommes et Migrations*, n°1129-1130, Février-mars 1990. *Laïcité - Diversité.*, 1990, https://www.persee.fr/issue/homig_1142-852x_1990_num_1129_1?sectionId=homig_1142-852x_1990_num_1129_1_1404.

³⁴ *Les foulards* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cac90037076/les-foulards>.

Pernyataan tersebut muncul ketika kasus Creil telah berkembang menjadi isu nasional dan mulai melibatkan berbagai organisasi serta kelompok pendukung di luar lingkungan sekolah. Meskipun namanya sering dikaitkan dengan polemik hijab yang sedang berlangsung, Fatima tidak menempatkan dirinya sebagai bagian dari gerakan politik ataupun aksi demonstrasi yang berkembang saat itu. Pengalamannya lebih tertuju pada upaya mempertahankan hak untuk bersekolah sambil tetap menjalankan keyakinan yang dianut. Pengalaman ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengalaman langsung para siswi dan berbagai bentuk mobilisasi yang muncul di ruang publik selama polemik berlangsung. Perdebatan hijab tidak selalu dijalani melalui aksi politik, tetapi juga melalui keputusan-keputusan sehari-hari yang harus mereka hadapi sebagai pelajar.

Pada 27 November 1989 *Conseil d'Etat* mengeluarkan Avis No. 346.893 mengenai penggunaan simbol keagamaan di sekolah negeri. Pendapat hukum tersebut menegaskan penggunaan simbol keagamaan oleh peserta didik pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *laïcité*. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila penggunaan simbol tersebut berubah menjadi tindakan propaganda, mengganggu ketertiban sekolah, atau menghambat proses pembelajaran. Keputusan ini memberikan ruang bagi sekolah untuk mempertimbangkan setiap persoalan secara individual sesuai dengan kondisi yang dihadapi.³⁵ Namun penerapan keputusan tersebut tidak berlangsung secara seragam. Sebagian sekolah memberikan ruang bagi siswi Muslim untuk tetap mengenakan hijab selama kegiatan belajar mengajar berjalan normal, sementara sebagian lainnya menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Akibatnya, pengalaman para siswi sangat bergantung pada cara masing-masing sekolah menafsirkan *laïcité*. Situasi ini menunjukkan belum adanya standar konsisten dalam menangani persoalan hijab di sekolah negeri Prancis pada awal dekade 1990-an.

Perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa penyelesaian kasus Creil tidak berhenti pada kompromi Oktober 1989. Laporan *Le Monde* edisi 12 Januari 1990 mencatat bahwa *conseil d'administration* (Dewan Sekolah) Collège Gabriel-Havez memilih mengikuti rumusan *Circulaire Jospin* yang lebih longgar, dan bukan usulan kepala sekolah Ernest Chénierre yang hendak melarang seluruh tanda keagamaan yang bersifat “*visible*” (terlihat). Usulan Chénierre ditolak setelah sejumlah anggota dewan menilai kata “*visible*” terlalu luas cakupannya, sehingga sekolah akhirnya membatasi diri pada rumusan “*ostentatoire*” (mencolok) sebagaimana tercantum dalam *circulaire* nasional. Pada saat itu, Fatima dan Leïla telah beberapa pekan tidak lagi mengenakan hijab di dalam kelas, sementara Samira masih mempertahankan sikapnya.³⁶

³⁵ “Avis N° 346.893 Du Conseil d’Etat - 27/11/1989 - Port Du Foulard Islamique - AHP DAJDP,” accessed June 21, 2026, <https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/avis-n-346-893-du-conseil-detat-27111989-port-du-foulard-islamique/>; *Décision conseil d’état* | INA.

³⁶ “L’application de la circulaire sur le foulard islamique Le conseil d’administration du collège de Creil est plus nuancé que le principal,” Archives, *Le Monde*, January 12, 1990,

Perkembangan berikutnya dilaporkan Le Monde edisi 28 Januari 1990: Samira akhirnya memutuskan melepas hijabnya dan kembali mengikuti *quatrième* (kelas empat) bersama teman-temannya, setelah pihak sekolah menegaskan ia harus berjanji tidak lagi mengenakan tanda mencolok apa pun yang berkaitan dengan afiliasi politik atau keagamaan. Dengan demikian, ketiga siswi Creil, Fatima, Leïla, dan Samira, sama-sama menempuh jalan kompromi berupa melepas hijab selama berada di dalam kelas demi mempertahankan akses pendidikan di Collège Gabriel-Havez. Sumber-sumber yang tersedia tidak menyebutkan bahwa mereka pindah sekolah atau menempuh pendidikan dari rumah; laporan media sezaman secara konsisten mencatat mereka tetap terdaftar dan kembali mengikuti pelajaran di sekolah yang sama.³⁷

Konflik serupa muncul di sekolah lain pada periode yang hampir bersamaan, memperlihatkan bahwa Creil bukan satu-satunya tempat pertentangan antara siswi berhijab dan pihak sekolah berlangsung. Di Lycée Philippe de Girard, Avignon, seorang siswi bernama Saïda telah mengenakan foulard selama tiga tahun sebelum kepala sekolah memintanya melepas hijab atau tidak kembali bersekolah. Berbeda dari Fatima, Leïla, dan Samira yang akhirnya menempuh kompromi, Saïda memilih mempertahankan hijabnya meskipun harus meninggalkan bangku sekolah. Dalam wawancara yang direkam Antenne 2, ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing dan mempertanyakan mengapa kepala sekolah hendak mengambil sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya, sembari menyatakan kesediaannya mengorbankan pendidikan demi mempertahankan keyakinan tersebut. Teman-teman sekelasnya menunjukkan solidaritas dengan datang mengenakan *foulard* keesokan harinya, tindakan yang langsung berujung pada pemanggilan mereka ke ruang kepala sekolah, sementara sebagian siswa laki-laki menyatakan kesiapan melakukan aksi mogok belajar.³⁸

Perbandingan antara Creil dan Avignon memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *laïcité* terhadap hijab pada 1989 belum memiliki standar yang seragam antar sekolah. Di Creil, kepala sekolah Ernest Chénrière membuka ruang negosiasi yang berujung pada kompromi melepas hijab di dalam kelas, sedangkan di Avignon, kepala sekolah langsung mengambil sikap tegas berupa larangan tanpa proses negosiasi yang setara, sehingga Saïda tidak memiliki pilihan selain keluar dari lycée tersebut. Respons siswa pun berbeda, di Creil dukungan datang terutama dari keluarga dan organisasi Muslim setempat, sementara di Avignon dukungan justru datang dari sesama siswa lintas latar belakang yang menyatakan solidaritas melalui pemakaian *foulard* bersama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa nasib siswi berhijab

https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/01/12/l-application-de-la-circulaire-sur-le-foulard-islamique-le-conseil-d-administration-du-college-de-creil-est-plus-nuance-que-le-principal_3968266_1819218.html.

³⁷ “Au collège de Creil La dernière élève récalcitrante renonce au foulard islamique,” Archives, *Le Monde*, January 28, 1990, https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/01/28/au-college-de-creil-la-derniere-eleve-recalcitrante-renonce-au-foulard-islamique_3975100_1819218.html.

³⁸ *Voiles, lycée Avignon* | INA.

pada masa itu sangat bergantung pada karakter kepala sekolah dan konteks lokal masing-masing, bukan semata pada satu kebijakan nasional yang berlaku seragam.³⁹

Ketidakseragaman tersebut berlanjut hingga awal 1990-an dan baru mendapatkan penegasan hukum melalui putusan *Conseil d'État* pada 2 November 1992 mengenai kasus Collège Jean-Jaurès di Montfermeil, Seine-Saint-Denis. Tiga siswi, Hatice Balo dan Ayse Balo yang berkewarganegaraan Turki, serta Samira Kherouaa yang berkewarganegaraan Prancis keturunan Aljazair, dikeluarkan secara definitif oleh dewan disiplin sekolah pada Desember 1990 karena mengenakan hijab. Berbeda dari Circulaire Jospin yang membatasi larangan pada tanda yang bersifat *ostentatoire*, peraturan tata tertib Collège Jean-Jaurès justru melarang secara mutlak segala tanda pembeda, baik berupa pakaian maupun lainnya, yang bersifat keagamaan, politik, atau filosofis. *Conseil d'État* membatalkan baik pasal peraturan tata tertib tersebut maupun keputusan pengeluaran ketiga siswi, dengan menegaskan bahwa larangan yang bersifat umum dan mutlak bertentangan dengan kebebasan berekspresi peserta didik dalam kerangka prinsip netralitas dan *laïcité*, karena tidak terbukti pemakaian hijab oleh ketiganya merupakan tindakan tekanan, provokasi, proselitisme, atau propaganda.⁴⁰

Putusan tersebut baru terbit hampir dua tahun setelah peristiwa terjadi, sementara konsekuensinya terhadap pendidikan ketiga siswi sudah telanjur nyata. Hatice Balo, yang saat dikeluarkan duduk di *sixième* (kelas enam), dan adiknya Ayse, yang duduk di *quatrième* (kelas empat), kehilangan sekitar enam bulan masa sekolah sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di sebuah pensionnat keagamaan di Turki. Samira Kherouaa, yang baru memasuki kelas enam pada 1990, terpaksa menempuh pendidikan melalui *correspondance* (pendidikan jarak jauh) selama periode tersebut. Konsekuensi kasus Montfermeil memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran aturan penerapan *laïcité* tidak lagi sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi telah memengaruhi keberlangsungan pendidikan para siswi.⁴¹

Perbandingan kasus Creil, Avignon, dan Montfermeil menegaskan bahwa sepanjang periode 1989-1992, batas antara ekspresi keagamaan, tanda yang dianggap mencolok, netralitas sekolah, dan ketertiban umum masih ditafsirkan secara berbeda oleh setiap sekolah. Sebagian sekolah, seperti Creil, memilih jalur negosiasi bertahap; sebagian lain, seperti Avignon dan Montfermeil, menerapkan larangan yang lebih tegas dan segera, dengan akibat yang jauh lebih berat bagi keberlangsungan pendidikan siswi yang terdampak. Variasi penerapan inilah yang

³⁹ *Voiles, lycée Avignon | INA.*

⁴⁰ “Les suites des polémiques de 1989 Le Conseil d’Etat annule l’exclusion de trois collégiennes portant le voile islamique,” Archives, *Le Monde*, November 4, 1992, https://www.lemonde.fr/archives/article/1992/11/04/les-suites-des-polemiques-de-1989-le-conseil-d-etat-annule-l-exclusion-de-trois-collegiennes-portant-le-voile-islamique_3931403_1819218.html.

⁴¹ *Le Monde*, “Les suites des polémiques de 1989 Le Conseil d’Etat annule l’exclusion de trois collégiennes portant le voile islamique.”

kemudian mendorong kebutuhan akan pedoman yang lebih seragam, kebutuhan yang mulai dijawab melalui *Circulaire Bayrou* pada 1994.

Pengalaman para siswi pada awal 1990-an juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan Caitlin Killian satu dekade kemudian terhadap perempuan Muslim keturunan Maghreb di Prancis, yang dipublikasikan dalam jurnal *Gender & Society* pada 2003, Caitlin Killian mewawancarai 45 perempuan Maghrebin generasi pertama di Paris dan sekitarnya antara Januari hingga Juni 1999, dengan 41 di antaranya secara khusus membahas polemik hijab. Killian menemukan bahwa perempuan Muslim tidak hanya menerima kebijakan sekolah secara pasif, tetapi mengembangkan berbagai strategi untuk tetap dapat mempertahankan identitas keagamaannya. Sebagian responden, terutama yang berpendidikan rendah, tidak memandang hijab sebagai persoalan sama sekali, sebagaimana disampaikan Bahia, perempuan Aljazair berusia 38 tahun, yang menyamakannya dengan pakaian biasa. Sebagian lain, umumnya perempuan muda berpendidikan tinggi, memaknai hijab sebagai bagian dari kebebasan individu yang sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan berekspresi dalam Republik Prancis.⁴²

Pengalaman para siswi sepanjang 1989-1994 tidak semata-mata ditandai oleh pembatasan yang dikenakan terhadap mereka, melainkan juga oleh beragam bentuk negosiasi, kompromi, dan penyesuaian yang mereka lakukan secara aktif. Para siswi tidak tampil sebagai kelompok yang sepenuhnya menolak aturan sekolah, dan juga bukan sebagai korban yang pasif tanpa daya. Para siswi tampil sebagai aktor sejarah yang aktif mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus memperjuangkan hak atas pendidikan. Konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan menerima atau menolak *laïcité*, melainkan usaha mencari ruang bagi identitas keagamaan di dalam sistem pendidikan republik yang menganut prinsip sekularisme.

Pergeseran Perdebatan dari Pengalaman Siswi ke Perdebatan Politik Nasional

Setelah beberapa tahun ditangani melalui negosiasi di tingkat sekolah, polemik hijab mulai memasuki babak baru pada pertengahan 1990-an. Perdebatan tidak lagi berpusat pada pengalaman para siswi, melainkan bergeser menuju perdebatan mengenai batas-batas penerapan *laïcité* dalam sistem pendidikan republik. Pergeseran tersebut memperoleh landasan administratif melalui terbitnya *Circulaire Bayrou* pada September 1994. Menteri pendidikan Francois Bayrou membedakan antara simbol keagamaan menjadi dua kategori, yaitu simbol yang bersifat *diskret* (*signes religieux discrets*) dan simbol agama yang dianggap *ostensif* (*signes religieux ostensibles*). Simbol agama yang bersifat diskret, seperti kalung salib berukuran kecil, masih diperbolehkan karena dipandang sebagai ekspresi keagamaan yang bersifat pribadi. Sebaliknya, simbol yang dianggap memperlihatkan identitas agama secara mencolok, termasuk hijab Islam, dipandang tidak sejalan

⁴² Caitlin Killian, "The Other Side of the Veil: North African Women in France Respond to the Headscarf Affair," *Gender and Society* 17, no. 4 (2003): 567-90.

dengan prinsip netralitas sekolah negeri sehingga penggunaannya mulai dibatasi. Kebijakan ini mempersempit ruang negosiasi yang sebelumnya masih dimungkinkan di tingkat sekolah dan mendorong lahirnya pendekatan yang lebih seragam terhadap penggunaan hijab di sekolah negeri.⁴³

Pergeseran tersebut berdampak langsung pada pengalaman para siswi. Jika sebelumnya mereka masih dapat bernegosiasi secara individual dengan kepala sekolah masing-masing, dengan terbitnya *Circulaire Bayrou*. Kebijakan ini mempersempit ruang negosiasi yang sebelumnya masih tersedia di tingkat sekolah dengan menetapkan kerangka yang lebih kaku dari tingkat nasional. Sejak saat itu, ruang negosiasi di tingkat sekolah semakin terbatas. Perdebatan yang sebelumnya berlangsung di lingkungan pendidikan beralih ke ruang politik nasional dan melibatkan media, partai politik, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga negara. Dalam proses tersebut, pengalaman para siswi semakin jarang menjadi pusat perhatian.⁴⁴

Pergeseran tersebut semakin menguat pada tahun 2003 ketika Presiden Jacques Chirac secara resmi mengumumkan pembentukan Komisi Stasi melalui pidato yang terdokumentasi di *Vie publique* tertanggal 3 Juli 2003. Berbeda dengan perdebatan tahun 1989 yang berawal dari pengalaman konkret beberapa siswi di satu sekolah negeri, pembahasan Komisi Stasi lebih banyak menyoroti hubungan antara Islam, sekularisme, integrasi nasional, dan identitas republik secara makro. Laporan komisi yang disampaikan kepada Presiden Chirac pada Desember 2003 kemudian merekomendasikan pelarangan simbol-simbol agama yang dianggap mencolok di sekolah negeri, mencakup hijab Islam, kippah Yahudi, dan salib Kristen berukuran besar. Perdebatan publik tidak lagi berpusat pada pengalaman siswi, melainkan pada persoalan batas-batas ruang publik dalam negara sekuler.⁴⁵

⁴³ "Prononcé le 10 septembre 1994 - François Bayrou 10091994 Le Point foulard islamique école | Vie publique," September 10, 1994, <https://www.vie-publique.fr/discours/216918-francois-bayrou-10091994-le-point-foulard-islamique-ecole>; Encyclopædia Universalis, "France. Circulaire du ministère de l'Éducation sur le port des signes religieux à l'école. 20 septembre 1994 - Événement," Encyclopædia Universalis, accessed June 30, 2026, <https://www.universalis.fr/evenement/20-septembre-1994-circulaire-du-ministere-de-l-education-sur-le-port-des-signes-religieux-a-l-ecole/>.

⁴⁴ Nicolas Weill, "What's in a Scarf?: The Debate on Laïcité in France," *French Politics, Culture & Society* 24, no. 1 (2006): 59-73.

⁴⁵ "Prononcé le 3 juillet 2003 - Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la laïc | Vie publique," July 3, 2003, <https://www.vie-publique.fr/discours/140444-allocution-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-laic>; "Commission de reflexion sur application du principe de laïcité | Vie publique," December 2003, <https://www.vie-publique.fr/rapport/26626-commission-de-reflexion-sur-application-du-principe-de-laicite>.

Gambar 3. Presiden Jacques Chirac saat mengumumkan dukungannya terhadap larangan simbol keagamaan mencolok di sekolah negeri Prancis, Desember 2003.



(Sumber: BBC News, 17 Desember 2003)

Perubahan fokus tersebut juga terlihat dalam pemberitaan media internasional. *The Guardian* edisi 15 Juni 2003 kembali mengangkat kasus Creil sebagai titik awal kronologi kontroversi hijab di Prancis, namun konten pemberitaan utamanya telah bergeser pada meningkatnya jumlah siswi berjilbab, kekhawatiran pemerintah terhadap fundamentalisme agama, serta perdebatan mengenai strategi integrasi komunitas Muslim dalam masyarakat Prancis.⁴⁶ Meskipun artikel tersebut masih memuat kutipan dari beberapa perempuan Muslim seperti Yasmina dan Nadia, mereka tidak lagi menjadi fokus utama pemberitaan, melainkan hanya berfungsi sebagai ilustrasi dari perdebatan yang lebih luas mengenai kebijakan negara.

Kecenderungan yang sama tampak dalam pemberitaan *The New York Times* edisi Oktober 2003. Kasus Lila dan Alma Lévy-Omari digunakan sebagai pintu masuk naratif untuk menjelaskan konteks pembentukan Komisi Stasi dan perdebatan mengenai masa depan *laïcité*.⁴⁷ Sebagian besar isi pemberitaan memuat argumen anggota komisi, pejabat negara, dan pakar hukum mengenai hubungan antara sekularisme, kebebasan individu dan kesetaraan gender. Pengalaman para siswi yang terdampak hanya muncul sebagai bagian pembuka pemberitaan sebelum narasi beralih sepenuhnya pada perdebatan di tingkat negara.

Memasuki awal tahun 2004, ketika rancangan undang-undang larangan simbol agama dibahas di parlemen, media internasional semakin menyoroti dinamika proses

⁴⁶ Hannah Godfrey, "Schools' Bid for Headscarf Ban Widens French Divide," *World News, The Guardian*, June 15, 2003, <https://www.theguardian.com/world/2003/jun/15/internationaleducationnews.religion>.

⁴⁷ Jennifer Joan Lee, "International Education: Expulsions over Veil Intensify French Debate on Secularity," *The New York Times*, October 21, 2003, <https://www.nytimes.com/2003/10/21/news/international-education-expulsions-over-veil-intensify-french-debate-on.html>.

legislasi tersebut daripada pengalaman para siswi secara individual. *CNN* melaporkan demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di Paris, London, Beirut, dan sejumlah kota lain sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pelarangan hijab. Salah seorang peserta aksi menyatakan: *"The hijab is a freedom, our right. It is not a symbol"*. Pergeseran ini memperlihatkan perubahan bahasa perjuangan. Pada 1989 hijab dipertahankan sebagai kewajiban agama, sedangkan pada 2004 pembelaan terhadap hijab semakin banyak menggunakan bahasa hak asasi manusia, kebebasan individu, dan anti-diskriminasi untuk menolak kebijakan pelarangan hijab.⁴⁸ Namun secara keseluruhan, pemberitaan *CNN* lebih banyak memfokuskan diri pada sikap pemerintah Prancis, dukungan parlemen, dan reaksi diplomatik internasional daripada pada pengalaman konkret siswi yang terdampak kebijakan.

Gambar 4. Demonstrasi menentang rancangan Undang-undang larangan simbol keagamaan di sekolah negeri Prancis di Lille, Februari 2004



(Sumber: Pascal Rossignol/Reuters, dimuat dalam NBC News, 10 Februari 2004)

Hal serupa terlihat dalam laporan *BBC* mengenai pengesahan Undang-undang 15 Maret 2004. Serangkaian laporan *BBC* dari Februari hingga September 2004 menampilkan pandangan pemerintah Prancis, anggota parlemen, kepala sekolah, dan para penentang kebijakan.⁴⁹ Suara siswi Muslim hanya muncul melalui beberapa kutipan singkat, umumnya berisi pernyataan tentang kebijakan tersebut diskriminatif dan mereka merasa identitasnya sebagai warga Prancis sekaligus Muslim tidak diakui secara penuh oleh negara. Dibandingkan dengan pemberitaan tahun 1989 yang secara ekstensif menampilkan wawancara langsung dengan Fatima,

⁴⁸ "Muslims Protest at Headscarf Ban," *CNN*, January 17, 2004, <https://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/01/17/france.headscarves/index.html?iref=storysearch>; "Debate over religious symbols divides France," *NBC News*, February 9, 2004, <https://www.nbcnews.com/id/wbna4106422>.

⁴⁹ Godfrey, "Schools' Bid for Headscarf Ban Widens French Divide"; *French MPs Back Headscarf Ban*, February 10, 2004, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3474673.stm>.

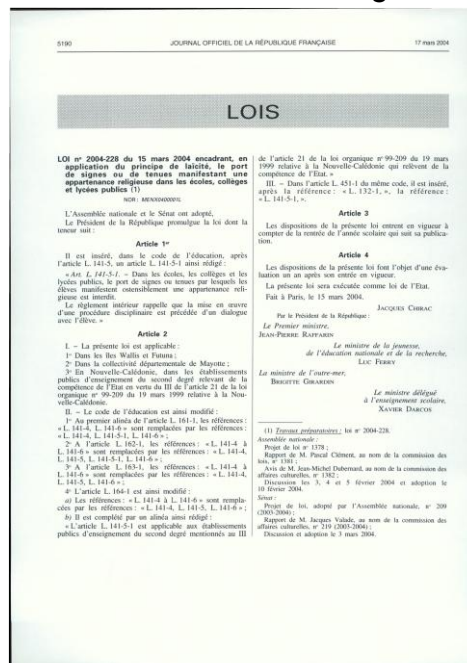
Leila, Saïda ruang bagi pengalaman siswi dalam pemberitaan tahun 2003-2004 tampak semakin terbatas.

Pergeseran perdebatan dari ruang sekolah menuju ranah politik nasional tersebut menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan yang lebih mengikat pada 2004. Perubahan itu tidak hanya mengubah arah perdebatan publik, tetapi juga membawa konsekuensi baru bagi pengalaman pendidikan siswi Muslim di sekolah negeri Prancis.

Dampak Larangan Hijab terhadap Pendidikan dan Identitas Siswi Muslim

Pengesahan Undang-undang 15 Maret 2004 tidak mengakhiri perdebatan mengenai hijab di Prancis. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan, perhatian tidak lagi berpusat pada perlu atau tidaknya pelarangan hijab di sekolah negeri, melainkan pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan. Berbeda dengan periode setelah *Affaire du Foulard* tahun 1989 ketika setiap kasus diselesaikan melalui dialog antara kepala sekolah, keluarga, dan siswi berdasarkan pertimbangan masing-masing sekolah, pengesahan undang-undang 2004 menandai berakhirnya penyelesaian kasus per kasus (*au cas par cas*) melalui keputusan *Conseil d'État*. Sejak saat itu, penggunaan simbol keagamaan di sekolah negeri diatur melalui satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.⁵⁰

Gambar 5. Halaman pertama Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
(Undang-undang tentang larangan penggunaan simbol
keagamaan mencolok di sekolah negeri Prancis).



(Sumber: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977>)

⁵⁰ LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics (1) - Légifrance; "Bulletin Officiel N° 21 Du 27 Mai 2004," accessed May 12, 2026, <https://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm>.

Meskipun landasan hukumnya telah ditetapkan, penerapan undang-undang masih memunculkan berbagai persoalan. Arsip Institut National de l'audiovisuel (INA) mengenai rancangan surat edaran pelaksanaan (*circulaire*) pada April 2004 memperlihatkan belum adanya kesepahaman mengenai makna simbol keagamaan yang mencolok. Perdebatan tidak lagi berkisar pada boleh atau tidaknya penggunaan hijab melainkan batas antara atribut keagamaan dan penutup kepala yang umum digunakan. Bandana sebagai contoh yang menjadi salah satu bentuk penutup kepala yang menimbulkan perbedaan tafsir karena selain dipakai sebagian siswi muslim sebagai pengganti hijab, juga lazim dikenakan oleh peserta didik lain tanpa makna keagamaan. Sejumlah kepala sekolah bahkan mengusulkan pelarangan seluruh penutup kepala apabila pedoman pelaksanaan tidak memberikan batas yang lebih jelas. Perdebatan ini memperlihatkan persoalan setelah 2004 tidak lagi terletak pada isi undang-undang, tetapi pada penerapannya di sekolah.⁵¹

Dorongan untuk menghadirkan aturan yang lebih tegas sebenarnya telah berkembang sebelum undang-undang disahkan. *Le Monde* mencatat bahwa banyak *Conseil d'État* tahun 1989 terlalu bergantung pada penafsiran masing-masing sekolah sehingga sering menimbulkan konflik yang berulang. Pembentukan Komisi Stasi, pidato Jacques Chirac pada Desember 2003, hingga lahirnya Undang-undang 2004 dipandang sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang selama hampir lima belas tahun diselesaikan melalui pendekatan kasus per kasus.⁵² Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan yang dikemukakan pemerintah Prancis. Dalam pembahasan rancangan undang-undang di Majelis Nasional, Menteri pendidikan Luc Ferry menegaskan sekolah negeri sebagai ruang pembentukan nilai-nilai republik. Karena itu, peserta didik wajib mengikuti kurikulum nasional, termasuk pendidikan jasmani, pembelajaran mengenai Holocaust, dan reproduksi manusia tanpa pengecualian atas dasar keyakinan agama. Dari sudut pandang pemerintah, larangan penggunaan simbol keagamaan yang mencolok diposisikan sebagai upaya netralitas sekolah sekaligus memperkuat prinsip *laïcité*.⁵³

Penilaian yang berbeda disampaikan Human Right Watch. Dalam pernyataannya pada Februari 2004, organisasi tersebut menilai larangan simbol keagamaan yang mencolok lebih banyak membebani siswi Muslim dibandingkan kelompok agama lain. Human Right Watch juga mengingatkan kemungkinan sebagian keluarga memilih menarik anak perempuan mereka dari sekolah negeri apabila penggunaan hijab tidak lagi diperbolehkan. Berbeda dengan kesaksian Fatima, Saïda, atau Siham, laporan ini tidak merekam pengalaman seorang siswi tertentu,

⁵¹ *La circulaire sur le voile* | INA, 1989, <https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/video/2547471001014/la-circulaire-sur-le-voile>.

⁵² "La loi sur le voile adoptée, le Conseil d'Etat défend son bilan en matière de laïcité," Archives, *Le Monde*, March 20, 2004, https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/03/20/la-loi-sur-le-voile-adoptee-le-conseil-d-etat-defend-son-bilan-en-matiere-de-laicite_357548_1819218.html.

⁵³ Elaine Sciolino, "French Assembly Votes to Ban Religious Symbols in Schools," World, *The New York Times*, February 11, 2004, <https://www.nytimes.com/2004/02/11/world/french-assembly-votes-to-ban-religious-symbols-in-schools.html>.

melainkan menyajikan penilaian institusional mengenai dampak kebijakan dari sudut pandang hak asasi manusia.⁵⁴

Kekhawatiran tersebut menemukan gambar konkret dalam laporan *Le Monde* mengenai Siham. Empat belas tahun setelah di dikeluarkan dari College Louis-Pasteur di Noyon karena mempertahankan hijab, Siham masih mengingat peristiwa itu sebagai titik balik dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya termasuk siswi berprestasi, tetapi setelah dikeluarkan dari sekolah harus belajar melalui pendidikan jarak jauh sebelum akhirnya menghentikan studi. Dalam wawancara itu, Siham menjelaskan hijab adalah bagian dari dirinya sejak kecil sehingga ia tidak sanggup melepaskannya demi tetap bersekolah. Meski demikian, ia tetap berharap suatu hari dapat mengikuti *baccalauréat* (ujian akhir sekolah menengah) dan melanjutkan pendidikannya.⁵⁵

Laporan *Le Monde* lainnya memperlihatkan pengalaman Siham bukan satu-satunya kasus. Menjelang pengesahan undang-undang, jumlah siswi yang secara resmi dikeluarkan dari sekolah relatif sedikit. Namun sebagian memilih meninggalkan sekolah sebelum proses disiplin berlangsung, sedangkan yang lain kesulitan mengikuti pendidikan jarak jauh hingga akhirnya putus sekolah. Kondisi ini memperlihatkan dampak kebijakan tidak selalu tercermin dalam jumlah sanksi resmi yang dijatuhkan sekolah. Keragaman respons juga terekam dalam pemberitaan BBC. Sebagian siswi memilih melepas hijab selama berada di sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Sebagian lainnya berpindah ke sekolah swasta Islam atau memilih jalur pendidikan alternatif. Bahkan, laporan *Muslim Girl Shaves Head over Ban* memberitakan seorang siswi yang mencukur rambutnya sebagai bentuk protes terhadap larangan hijab. Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi Undang-undang 2004 tidak berhenti pada persoalan seragam sekolah, tetapi turut memengaruhi pilihan pendidikan, kehidupan sosial sehari-hari para siswi Muslim, dan cara para siswi mempertahankan identitas keagamaannya.⁵⁶

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Caitlin Killian serta Françoise Gaspard dan Farhad Khosrokhavar. Killian menemukan perempuan Muslim keturunan Afrika Utara tidak memandang identitas sebagai Muslim dan warga negara Prancis sebagai dua identitas yang saling bertentangan. Sementara itu, Gaspard dan Khosrokhavar memperlihatkan alasan mengenakan hijab sangat beragam, mulai dari keyakinan agama, identitas keluarga, hingga cara menjaga martabat di ruang publik.

⁵⁴ *France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom* | Human Rights Watch, February 26, 2004, <https://www.hrw.org/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-freedom>.

⁵⁵ “Quatorze ans après son renvoi, Siham rêve toujours de passer le bac,” Archives, *Le Monde*, February 10, 2004, https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/02/10/quatorze-ans-apres-son-renvoi-siham-reve-toujours-de-passer-le-bac_352401_1819218.html.

⁵⁶ *Muslim Girl Shaves Head over Ban*, October 1, 2004, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3708444.stm>.

Keragaman itu menegaskan tidak ada satu pengalaman yang dapat mewakili seluruh siswi Muslim di Prancis.⁵⁷

Dalam perspektif Social Identity Theory yang dikemukakan Tajfel dan Turner, pengalaman para siswi setelah berlakunya Undang-undang 2004 mencerminkan proses negosiasi identitas ketika identitas keagamaan mereka berhadapan dengan tuntutan identitas kewarganegaraan di ruang publik. Sebagian memilih menyesuaikan diri dengan aturan sekolah demi mempertahankan akses pendidikan, sedangkan sebagian lainnya mempertahankan hijab meskipun harus berpindah sekolah atau menempuh jalur pendidikan alternatif. Dengan demikian, pengesahan Undang-undang 2004 tidak hanya mengubah mekanisme pengaturan simbol keagamaan di sekolah negeri, tetapi juga memengaruhi pilihan pendidikan, pengalaman sosial, dan pembentukan identitas sebagian siswi Muslim di Prancis.

KESIMPULAN

Polemik hijab di sekolah negeri Prancis sepanjang 1989-2004 tidak hanya memperlihatkan perubahan dari persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari para siswi di sekolah menjadi perdebatan mengenai hubungan antara agama, pendidikan, dan negara di tingkat nasional. Kasus Creil pada Oktober 1989 menjadi titik awal polemik tersebut ketika Fatima Achaboun, Leila Achaboun, Samira Saidani mempertahankan penggunaan hijab di College Gabriel-Havez. Peristiwa ini kemudian berkembang melampaui lingkup sekolah dan mendorong keterlibatan kepala sekolah, pemerintah, media, pengadilan, organisasi masyarakat, hingga parlemen dalam menentukan batas antara kebebasan beragama dan prinsip *laïcité* di lingkungan pendidikan negeri.

Penelitian ini menemukan empat hal penting. Pertama, bagi para siswi Muslim, hijab dipahami sebagai bagian dari identitas keagamaan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan semata-mata simbol politik sebagaimana sering dipersepsikan dalam perdebatan publik. Kesaksian Fatima Achaboun di Creil maupun Saïda di Avignon memperlihatkan alasan yang relatif serupa yaitu menempatkan penggunaan hijab sebagai bagian dari keyakinan yang tidak mudah dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kedua, penerapan prinsip *laïcité* pada periode 1989-1992 tidak berlangsung seragam. Perbandingan kasus Creil, Avignon, dan Montfermeil memperlihatkan adanya variasi penafsiran di tingkat sekolah mengenai batas antara ekspresi keagamaan dan netralitas pendidikan, meskipun *Avis Conseil d'État* tahun 1989 telah memberikan pedoman umum mengenai kebebasan beragama para peserta didik. Ketiga, sejak terbitnya *Circulaire Bayrou* pada 1994, perdebatan mengenai hijab secara bertahap bergeser dari persoalan yang dihadapi para siswi menuju pembahasan yang lebih luas mengenai *laïcité*, integrasi, identitas republik, dan ruang publik. Pergeseran tersebut semakin menguat melalui pembentukan

⁵⁷ Killian, "The Other Side of the Veil"; Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar, *Le Foulard et la République*.

Komisi Stasi pada 2003 dan berakhir pada pengesahan *Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004*, yang menetapkan larangan penggunaan simbol atau tanda keagamaan yang mencolok di sekolah negeri. Perubahan ini sekaligus mengakhiri penyelesaian kasus per kasus yang sebelumnya berkembang melalui praktik di masing-masing sekolah. Keempat, penerapan Undang-undang 2004 membawa konsekuensi yang berbeda-beda bagi para siswi Muslim. Sebagian memilih menyesuaikan diri dengan aturan sekolah agar tetap memperoleh akses pendidikan, sebagian berpindah ke sekolah lain, sementara sebagian lainnya meninggalkan sistem pendidikan negeri. Berbagai respons tersebut menunjukkan dampak kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga memengaruhi perjalanan pendidikan, relasi sosial, dan cara para siswi mempertahankan identitas keagamaannya.

Dalam perspektif Teori Identitas Sosial yang dikemukakan Tajfel dan Turner, berbagai pilihan yang diambil para siswi Muslim mencerminkan proses negosiasi identitas keagamaan mereka berhadapan dengan penerapan prinsip *laïcité* di sekolah negeri. Dengan demikian, sejarah perdebatan hijab di Prancis pada periode 1989-2004 tidak hanya berkaitan dengan perkembangan prinsip *laïcité* maupun perubahan kebijakan pendidikan negara, tetapi juga merekam pengalaman para siswi Muslim dalam mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus memperoleh akses terhadap pendidikan di tengah perubahan sosial, politik, dan hukum yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Mutiara Marsha, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, and Ghaitsa Zahira Raspati. "Problematisasi Larangan Berhijab Di Prancis." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/486>.
- Annur, Barsihannor. "Perkembangan Pemikiran Islam Di Prancis." *Jurnal Adabiyah* 14, no. 1 (June 2014): 25-31.
- "Avis N° 346.893 Du Conseil d'Etat - 27/11/1989 - Port Du Foulard Islamique - AHP DAJDP." Accessed June 21, 2026. <https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/avis-n-346-893-du-conseil-detat-27111989-port-du-foulard-islamique/>.
- Basri, Muhammad Ridha. "Dilema Negara Sekuler Prancis: Di antara Tarikan Islamofobia dan Fundamentalisme Agama." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (July 2022): 143-59. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i1.3127>.
- "Bulletin Officiel N° 21 Du 27 Mai 2004." Accessed May 12, 2026. <https://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm>.
- "Commission de reflexion sur application du principe de laïcité | Vie publique." December 2003. <https://www.vie-publique.fr/rapport/26626-commission-de-reflexion-sur-application-du-principe-de-laicite>.
- Décision conseil d'état* | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclairer-actu/video/cab89050148/decision-conseil-d-etat>.

- Esmano, Syifa, and Airin Miranda. "Pengaruh Kebijakan Laicite Terhadap Muslim Di Institusi Pendidikan Negeri Prancis Pada Masa Pemerintahan Macron." *Multikultura* 1, no. 1 (January 2022). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1082>.
- Foulards islamiques | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab89051112/foulards-islamiques>.
- France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom | Human Rights Watch. February 26, 2004. <https://www.hrw.org/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-freedom>.
- Francoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar. *Le Foulard et la République*. Paris: Éditions La Découverte, 1995.
- French MPs Back Headscarf Ban. February 10, 2004. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3474673.stm>.
- Godfrey, Hannah. "Schools' Bid for Headscarf Ban Widens French Divide." *World News. The Guardian*, June 15, 2003. <https://www.theguardian.com/world/2003/jun/15/internationaleducationnews.religion>.
- Guerlac, Othon. "The Separation of Church and State in France." *Political Science Quarterly* 23, no. 2 (June 1908): 259-96. <https://doi.org/10.2307/2141325>.
- Hamdan, Amani. "The Issue of Hijab in France: Reflections and Analysis." *Muslim World Journal of Human Rights* 4, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1079>.
- Henri Tajfel and John C. Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." In *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 33-47. Monterey, California, 1979.
- Hommes et Migrations*, n° 1129-1130, Février-mars 1990. *Laïcité - Diversité*. 1990. https://www.persee.fr/issue/homig_1142-852x_1990_num_1129_1?sectionId=homig_1142-852x_1990_num_1129_1_1404.
- Jennifer Joan Lee. "International Education: Expulsions over Veil Intensify French Debate on Secularity." *The New York Times*. October 21, 2003. <https://www.nytimes.com/2003/10/21/news/international-education-expulsions-over-veil-intensify-french-debate-on.html>.
- Killian, Caitlin. "The Other Side of the Veil: North African Women in France Respond to the Headscarf Affair." *Gender and Society* 17, no. 4 (2003): 567-90.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- La circulaire sur le voile* | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/2547471001014/la-circulaire-sur-le-voile>.
- Le Monde*. "Au collège de Creil La dernière élève récalcitrante renonce au foulard islamique." Archives. January 28, 1990. https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/01/28/au-college-de-creil-la-derniere-eleve-recalcitrante-renonce-au-foulard-islamique_3975100_1819218.html.
- . "La loi sur le voile adoptée, le Conseil d'Etat défend son bilan en matière de laïcité." Archives. March 20, 2004.

- https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/03/20/la-loi-sur-le-voile-adoptee-le-conseil-d-etat-defend-son-bilan-en-matiere-de-laicite_357548_1819218.html.
- . “L’application de la circulaire sur le foulard islamique Le conseil d’administration du collège de Creil est plus nuancé que le principal.” Archives. January 12, 1990. https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/01/12/l-application-de-la-circulaire-sur-le-foulard-islamique-le-conseil-d-administration-du-college-de-creil-est-plus-nuance-que-le-principal_3968266_1819218.html.
- . “Les suites des polémiques de 1989 Le Conseil d’Etat annule l’exclusion de trois collégiennes portant le voile islamique.” Archives. November 4, 1992. https://www.lemonde.fr/archives/article/1992/11/04/les-suites-des-polemiques-de-1989-le-conseil-d-etat-annule-l-exclusion-de-trois-collegiennes-portant-le-voile-islamique_3931403_1819218.html.
- . “Mettant en cause les enseignements spécifiques pour les immigrés M. Jospin insiste sur la réduction des inégalités pour tous les enfants.” Archives. February 1, 1990. https://www.lemonde.fr/archives/article/1990/02/01/mettant-en-cause-les-enseignements-specifiques-pour-les-immigres-m-jospin-insiste-sur-la-reduction-des-inegalites-pour-tous-les-enfants_3968492_1819218.html.
- . “Quatorze ans après son renvoi, Siham rêve toujours de passer le bac.” Archives. February 10, 2004. https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/02/10/quatorze-ans-apres-son-renvoi-siham-reve-toujours-de-passer-le-bac_352401_1819218.html.
- Les écolières voilées de Creil* | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab89042462/les-ecolieres-voilees-de-creil>.
- Les foulards* | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cac90037076/les-foulards>.
- Loi Du 9 Décembre 1905 Concernant La Séparation Des Eglises et de l’Etat. - Légifrance. Accessed June 21, 2026. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749>.
- LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics (1) - Légifrance. Accessed May 12, 2026. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977>.
- Madjid, M. Dien. *Metode Sejarah: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Madjid, M. Dien and Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Pertama. Depok: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Alfareza Romadhoni. “Sekularisme Dan Islamophobia Dalam Kebijakan Publik Prancis Terhadap Muslim: Studi Transformasi Laïcité Dan Diskriminasi Terlembaga Pasca 2020.” *Jurnal Globalisasi Dan Luar Negeri* Vol. 1 No. 2 (July 2024). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/12946>.
- Muslim Girl Shaves Head over Ban*. October 1, 2004. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3708444.stm>.

- “Muslims Protest at Headscarf Ban.” CNN. January 17, 2004. <https://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/01/17/france.headscarves/index.html?iref=storysearch>.
- NBC News. “Debate over religious symbols divides France.” February 9, 2004. <https://www.nbcnews.com/id/wbna4106422>.
- Nuraeni, Leni, and Setia Gumilar. “Pelarangan Dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Pelajar Putri Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991.” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (December 2021): 163-75. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i2.15119>.
- Paul Silverstein. “Headscarves and the French Tricolor.” Middle East Research and Information Project, January 30, 2004. <https://www.merip.org/2004/01/headscarves-and-the-french-tricolor/>.
- “Prononcé le 3 juillet 2003 - Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, sur la laïc | Vie publique.” July 3, 2003. <https://www.vie-publique.fr/discours/140444-allocution-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-laic>.
- “Prononcé le 10 septembre 1994 - François Bayrou 10091994 Le Point foulard islamique école | Vie publique.” September 10, 1994. <https://www.vie-publique.fr/discours/216918-francois-bayrou-10091994-le-point-foulard-islamique-ecole>.
- Refusal of Admission to the College of Creil*. 1989. <https://mediaclip.ina.fr/en/cab89042091-refusal-of-admission-to-the-college-of-creil.html>.
- Sciolino, Elaine. “French Assembly Votes to Ban Religious Symbols in Schools.” World. *The New York Times*, February 11, 2004. <https://www.nytimes.com/2004/02/11/world/french-assembly-votes-to-ban-religious-symbols-in-schools.html>.
- Scott, Joan Wallach. “Chapter 1. The Headscarf Controversies.” In *The Politics of the Veil*, 21-41. Princeton University Press, 2019. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781400827893-004/html?lang=en>.
- Tempest, Rone. “Muslim Schoolgirl Scarves Banned; France in a Furor.” Los Angeles Times, November 7, 1989. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-07-mn-880-story.html>.
- “The Colonial and Post-Colonial Dimensions of Algerian Migration to France, an Article from History in Focus.” Accessed June 20, 2026. <https://archives.history.ac.uk/history-in-focus/Migration/articles/house.html>.
- Trois Foulards Contre La. “Trois Foulards Contre La « Sérénité Laïque ».” Le Monde. October 7, 1989. https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/10/07/trois-foulards-contre-la-serenite-laique_4130105_1819218.html.
- Universalis, Encyclopædia. “France. Circulaire du ministère de l’Éducation sur le port des signes religieux à l’école. 20 septembre 1994 - Événement.” Encyclopædia Universalis. Accessed June 30, 2026.

- <https://www.universalis.fr/evenement/20-septembre-1994-circulaire-du-ministere-de-l-education-sur-le-port-des-signes-religieux-a-l-ecole/>.
- “Veiled Meaning: The French Law Banning Religious Symbols in Public Schools.”
Brookings, n.d. Accessed May 12, 2026.
<https://www.brookings.edu/articles/veiled-meaning-the-french-law-banning-religious-symbols-in-public-schools/>.
- Voiles, lycée Avignon* | INA. 1989. <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cab89044629/voiles-lycee-avignon>.
- Wieviorka, Michel. *Kepel (Gilles) - Les banlieues de l'Islam, Naissance d'une religion en France*. 1989. https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1989_num_39_4_394435_t1_0593_0000_001.
- Wing, Adrien K., and Monica Nigh Smith. “Critical Race Feminism Lifts the Veil? Muslim Women, France, and the Headscarf Ban.” SSRN Scholarly Paper No. 1130247. Rochester, NY: Social Science Research Network, May 30, 2008. <https://papers.ssrn.com/abstract=1130247>.